

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- Tugas : Melaksanakan Penyusunan program dan petunjuk teknis Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan pengembangan otonomi daerah, kerjasama daerah, dan pembinaan kecamatan serta penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;
 - b. pelaksanaan pengembangan otonomi daerah ;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama daerah ;
 - d. pembinaan kecamatan ;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat : Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Serta Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian serta Kecamatan ;
 - f. Penyusunan rencana program, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Penyampaian Laporan Kinerja Pemerintahan tepat Waktu b. Prosentase Kelurahan Beradministrasi Baik c. Prosentase MoU yang ditetapkan 		<ul style="list-style-type: none"> a. Data Laporan dari OPD se Kota Madiun b. Buku Administrasi Kelurahan se Kota Madiun c. Sumber data dari OPD, departemen, lembaga pemerintah non departemen

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Bagian Administrasi Pembangunan
- Tugas : Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa, evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Administrasi Pembangunan ;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa ;
 - c. pelaksanaan pengendalian administrasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan), Penelitian dan Pengembangan, serta Perencanaan pembangunan ;
 - e. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Administrasi Pembangunan ;
dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat daerah	<p>a. Prosentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi</p> <p>b. Prosentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Paket Pengadaan terealisasi/Jumlah Paket Pengadaan dalam RUP) x 100 %</p> <p>(Jumlah OPD yang menyerahkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebelum tanggal 10 tiap bulan/Jumlah Total OPD) x 100 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) - Data Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD - Data pelaksanaan pengadaan yang diperoleh dari proses pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan melalui laman LPSE <p>Data Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Bagian Hukum
- Tugas : Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa, evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum ;
 - b. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan ;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
 - e. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan penyuluhan hukum;
 - h. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan memelihara sarana di Bagian Hukum ; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat daerah	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	(Jumlah PERDA yang ditetapkan/Jumlah PERDA dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah) x 100 %	Himpunan Lembaran Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Bagian Umum
- Tugas : Melaksanakan urusan tata usaha, keuangan Sekretariat Daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.
- Fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Umum ;
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan pimpinan, umum dan sekretariat daerah ;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan sekretariat daerah dan pimpinan ;
 - d. pelaksanaan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - e. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan ;
 - g. pelaksanaan urusan kepegawaian sekretariat daerah ;
 - h. perencanaan program, pelaksanaan/pengadaan pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana, guest house, rumah jabatan walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, wisma surabaya dan di lingkungan sekretariat daerah yang menjadi kewenangannya ; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat daerah	a. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah b. Persentase pelayanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Asisten)		a. Survey kepuasan Sekretariat Daerah diambil dari survey kepuasan 6 Bagian di Sekretariat Daerah b. Dokumen catatan pelayanan keprotokolan kepada pimpinan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- Tugas : Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja.
- Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Organisasi ;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta pelaksanaan analisis dan formasi jabatan ;
c. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pengembangan kinerja ;
e. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Organisasi ; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
			<p>Range Penilaian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori AA → Nilai Angka >90-100 : Sangat Memuaskan. 2. Kategori A → Nilai Angka >80,01-90 : Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. 3. Kategori BB → Nilai Angka >70,01-80 : Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 4. Kategori B → Nilai Angka >60,01-70 : Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
			<p>5. Kategori CC → Nilai Angka >50,01-60 : Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.</p> <p>6. Kategori C → Nilai Angka >30,01-50 : Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.</p> <p>7. Kategori D → Nilai Angka 0-30 : Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.</p>	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	<p>Jumlah Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik <i>dibagi</i> Penyelenggara Pelayanan Publik <i>dikali</i> 100%</p> <p>Range Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu Pelayanan A → Nilai Interval Konversi 88,31–100,00 : Sangat Baik 2. Mutu Pelayanan B → Nilai Interval Konversi 76,61-88,30 : Baik 3. Mutu Pelayanan C → Nilai Interval Konversi 65,00-76,60 : Kurang Baik 4. Mutu Pelayanan D → Nilai Interval Konversi 25,00-64,99 : Tidak Baik 	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan prasarana BUMD dan pemberdayaan perekonomian serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dan pemberdayaan perekonomian;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Badan Usaha Milik Daerah ;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pemberian saran dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang : Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan, Aparatur dan Pengawasan ;

- f. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya stabilitas perekonomian fasilitasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Inflasi b. Persentase kegiatan keagamaan dan masyarakat yang difasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. IHK (Indeks Harga Konsumen) : cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli b. Jumlah kegiatan keagamaan dan masyarakat yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Berita Resmi Statistik (BRS) dari BPS Kota Madiun b. SIKUDA pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2019-2024

NO	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	STRATEGI KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai EKPPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk meningkatkan kinerja birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja yang yang berpihak pada kebutuhan masyarakat 2. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah berbasis E-government, E-planning, E-budgeting, E-Contract dan E-Monev. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Sekretariat DPRD 4. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5. Inspektorat 6. BAPPEDA

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENGANGGUNG JAWAB
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersinergi di lingkungan pemerintah Kota Madiun	1. Nilai EKPPD	1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	1. Persentase penyampaian Laporan LKPJ tepat waktu 2. Persentase kelurahan beradministrasi baik 3. Persentase MoU yang ditetapkan	1. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah maupun instansi terkait dalam rangka validasi data dan pelaksanaan kegiatan 2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu 3. Meningkatkan kerjasama antar daerah	1. Penataan Daerah Otonomi Baru	Penyampaian LKPJ Tepat Waktu	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan 2. Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan 3. Inventarisasi Rupa Bumi 4. Pembinaan Kecamatan 5. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kinerja pemerintahan yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Jumlah peringatan hari jadi pemerintahan yang dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan Jumlah dokumen rupa bumi Jumlah pembinaan kecamatan Jumlah kunjungan	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
			<p>4. Prosentase pengadaan barang/jasa yang terealisasi</p> <p>5. Prosentase OPD yang melaporkan progres fisik tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan</p>	<p>1. Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur</p> <p>3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>5. Melakukan sosialisasi ttg administrasi pelaksanaan kegiatan pemb.</p> <p>6. Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>2. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah</p> <p>1. Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>1. Jumlah Perjanjian Kerjasama</p> <p>1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi</p>	<p>1. Pelaksanaan Kerjasama Daerah</p> <p>1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>2. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan</p>	<p>Jumlah MoU</p> <p>Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa</p> <p>Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang</p> <p>Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang</p> <p>Jumlah dokumen/laporan</p>	<p>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</p>

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	Indikator TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
			6. Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	7. Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur 9. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait 10. Meningkatkan pengelolaan website	2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 1. Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Persentase Produk Hukum yang berkualitas	1. Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi 2. Penyusunan Buku Petunjuk Operasional 1. Penyusunan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun Jumlah raperda/ perda, kompilasi, sosialisasi perda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	Indikator TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
			7. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah 8. Persentase pelayanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Asisten)	1. Menata standar pelayanan administrasi 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait 3. Pembinaan tata naskah dinas 4. Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal 5. Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik 6. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	2. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan 1. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Prosentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu Jumlah dokumen yang disusun	Bagian Umum

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
			9. Nilai AKIP Sekretariat Daerah	<p>14. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan</p> <p>15. Meningkatkan skill staf</p> <p>1. Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur Setda terkait dengan akuntabilitas kinerja</p> <p>2. Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Setda</p> <p>4. Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Setda</p>	<p>4. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>1. Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah</p>	<p>Prosentase pelayanan kedinasan Pimpinan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) sesuai target yang telah ditetapkan</p>	<p>1. Pelaksanaan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>2. Peningkatan kesegaran jasmani Sekretariat Daerah</p> <p>1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>3. Peningkatan Budaya Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>4. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah kegiatan pemerintah kota</p> <p>Jumlah pelaksanaan kesegaran jasmani</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai target</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (>70-80)</p> <p>Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif</p>	Bagian Organisasi

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	2. Nilai AKIP Pemerintah Kota Madiun	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja 2. Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja 4. Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun 5. Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid 	1. Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) sesuai target yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 3. Peningkatan Budaya Kinerja Pemerintah Daerah 4. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 	<p>Jumlah Perangkat Daerah Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai target</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (>70-80)</p> <p>Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	Bagian Organisasi

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	3. Meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan publik	Persentase penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya bernilai baik	6. Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi 7. Meningkatkan jumlah dan kuantitas SDM bidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan pengembangan kinerja guna melaksanakan program reformasi Birokrasi	2. Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	5. Standarisasi Penataan Jabatan 1. Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik 2. Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B Nilai evaluasi administrasi ketatalaksanaan	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
Terwujudnya koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat inflasi 2. Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Kualitas Hidup Beragama 	<p>Jumlah kegiatan pendukung stabilitas ekonomi</p> <p>Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2. Pembinaan BUMD 3. Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan (LK) 4. Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan 	<p>Jenis kegiatan TPID</p> <p>Kontribusi PAD BUMD</p> <p>Jumlah peserta yang ikut sosialisasi</p> <p>Jumlah Kegiatan Pengembangan</p> <p>Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan Kegiatan Keagamaan lainnya</p>	Bag. Adm Perekonomian dan Kesra

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI KEBIJAKAN	SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
							2. Pemberangkatan dan Penjemputan Haji 3. Pengiriman Kafilah MTQ 4. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah calon jamaah haji yang terdaftar Jumlah peserta yang mjd juara tingkat Kota Jumlah peserta yang lolos seleksi	